ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2016-2021

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Muhammad Darwis Khaula Arwan

Nomor Mahasiswa : 18313202

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2016-2021

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama	: Muhammad Darwis Khaula Arwan
Nomor Induk Mahasiswa	: 18313202
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Penulis,



Muhammad Darwis Khaula Arwan

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2016-2021

Nama	: Muhammad Darwis Khaula Arwan
Nim	: 18313202
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 12 Juni 2023

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Telah menyetujui untuk diujikan



Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDE

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar
sarjana jenjang strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Nama	: Muhammad Darwis Khaula Arwan
Nim	: 18313202
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Disahkan oleh

Pembimbing Skripsi	: Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDEc.
Penguji	: Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2022/2023, hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama	: MUHAMMAD DARWIS KHAULA ARWAN
NIM	18313202
Judul Tugas Akhir	: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2016-2021
Dosen Pembimbing	: Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A

Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc. .....

Anggota Tim : Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si .....

Yogyakarta, 11 Juli 2023

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

\KTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun oleh : MUHAMMAD DARWIS KHAULA ARWAN

Nomor Mahasiswa 18313202

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 11 Juli 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.

Penguji : Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PENGESAHAN UJIAN ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xii**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II **6**
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **6**
2.1 Kajian Pustaka 6
2.2 Landasan Teori 10
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia 10
2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah 11
2.2.3 Pengeluaran pemerintah 12
2.2.4 Pengeluaran perkapita 13
2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto 13
2.3 Hubungan Antara Variabel Dependent dan Independen 16
2.3.1 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Angka Partisipasi Sekolah 16
2.3.2 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan 16
2.3.3 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengeluaran Perkapita 17

2.3.4 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Produk Domestik Regional Bruto 17
2.4 Kerangka Pemikiran 17
2.5 Hipotesis Penelitian 18
BAB III 19
METODE PENELITIAN 19
3.1 Cara Dan Jenis Pengumpulan Data 19
3.2 Definisi Operasional Variabel 19
3.2.1 Variabel Dependent 19
3.2.2 Variabel Independen 20
3.3 Metode Analisis 22
3.3.1 Common Effect Model 23
3.3.2 Fixed Effect Model 24
3.3.3 Random Effect Model 24
3.4 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel 24
3.4.1 Uji Chow 24
3.4.2 Uji Hausman 25
3.4.3 Uji Lagrange Multiplier 25
3.5 Uji Statistik 26
3.5.1 Koefisien Determinasi (R2) 26
3.5.2 Koefisien Regresi Bersama (Uji F) 26
3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T) 26
BAB IV 28
HASIL DAN PEMBAHSAN 28
4.1 DESKRIPSI DATA 28
4.2 PENGUJIAN HASIL REGRESI 29
4.2.1 Common Effect Model 29
4.3 HASIL PENGUJIAN REGRESI MODEL DATA PANEL 32
4.3.1 Hasil Uji Chow (Chow Test) 32
4.3.2 Uji Hausman 32
4.4 MODEL TERBAIK 33
4.4.1 Uji Kebaikan Regresi (R^2) 34
4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F) 34

4.4.3 Uji statistik (Uji t) 34
4.5 INTERPRETASI HASIL 35
4.5.1 Hubungan APS Terhadap IPM. 35
4.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 35
4.5.3 Hubungan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia... 36
4.5.4 Hubungan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 36
BAB V 38
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 38
5.1 Kesimpulan 38
5.2 Implikasi 38
LAMPIRAN 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 IPM Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021 2

Tabel 4. 1 Deskripsi Data 28
Tabel 4. 2Tabel Regresi Model Common Effect Model 29
Tabel 4. 3 Tabel Regresi Model Fixed Effect 30
Tabel 4. 4 Tabel Regresi Model Random Effect 31
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow 32
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman 32
Tabel 4. 7 Regresi Data Panel Model Terbaik : Fixed Effect Model 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 17

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan karunia-Nya serta kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta Abah dan Ummi atas kasih sayang, perhatian, dan doa yang tanpa henti diberikan untuk peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Mahbub Aniq, Faza Amalia, Noor Adibah, Arina Hidayah, yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi Bapak Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDEc. selaku yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan masukan dan bantuan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul "**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah 2016 – 2021**". Penelitian ini selain bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melihat kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa selama proses penyusunan skripsi penulis mendapat banyak bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan segala hal, baik dunia maupun akhirat.
3. Kedua Orangtua penulis yaitu Ummi Siti Maryam dan Abah Muhlis Hilal yang telah memberikan dukungan, dorongan semangat, dan do'a yang selalu tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kakak Mahbub Aniq, Faza amaliya, Noor Adibah, dan Arina Hidayah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah beliau dan diberikan banyak rezeki yang halal dan barokah. Allahuma amin.
4. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDEc selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusuna skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto M.Si. selaku dosen penguji skripsi yang senantiasa sabar dalam menguji bimbingan, dan memberi saran serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Abdul Hakim S.E. M.Ec. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
9. Bapak / Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini. Dosen beserta seluruh staf Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi Khususnya dan Dosen serta staf Tata Usaha dan Staf Akademik di Lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
10. Keluarga besar Bani Hilal dan Bani Azhari yang selama ini memberikan dukungan secara moral dan spiritual. Semoga kebaikan kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT.
11. Indra Saputra S.E terimakasih telah menjadi mentor penulis dan sangat berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua teman-teman Ilmu Ekonomi 2018 yang telah banyak membantu, berbagi ilmu, saling mendukung dan menyemangati dalam kegiatan kuliah

Yogyakarta, 12 Juni 2023



Penulis,
Muhammad Darwis Khaula Arwan

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah 2016-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah regresi data panel, yaitu berupa penggunaan data *time series* berupa data tahun 2016 sampai 2021, dan data *cross section* berupa data yang bersumber dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan model terbaik yaitu *fixed effect model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Angka Partisipasi Sekolah berpengaruh positif serta signifikan, Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif serta signifikan, variabel Pengeluaran Perkapita berpengaruh positif serta signifikan dan variabel PDRB berpengaruh positif serta signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten / kota di provinsi jawa tengah

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Sekolah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Perkapita, Produk Domestik Regional Bruto.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan utama nya meningkatkan kondisi yang lebih baik dalam berkesinambungan. Proses pembangunan ekonomi bisa dikatakan suatu proses yang membawa perubahan pada orientasi system ataupun struktur organisasi dalam perekonomian dan sosial (Todaro dan Smith, 2011).

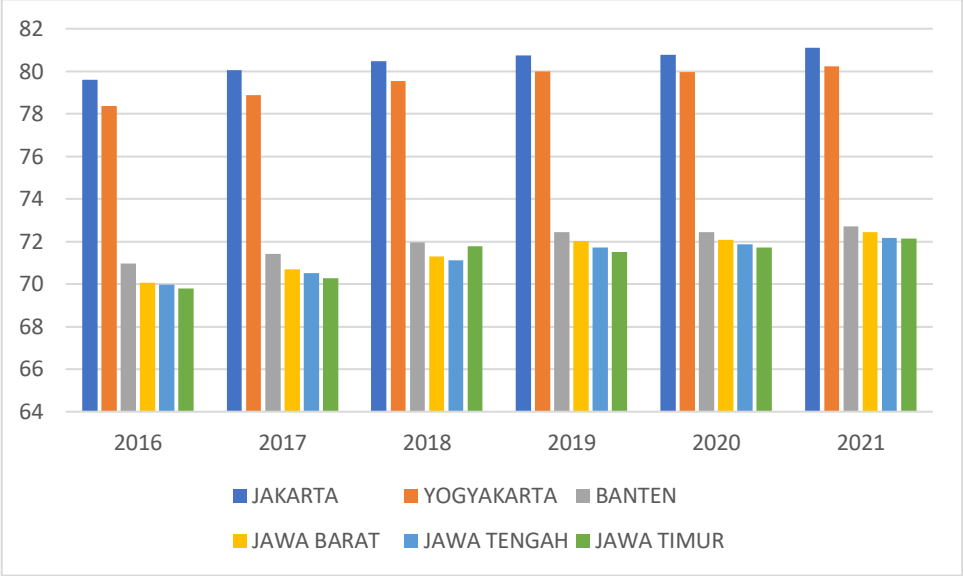
Menurut Ashshiddiqi et al (2021) hal tersebut menjadi salah satu upaya bagi suatu daerah atau negara untuk mewujudkan kemajuan masyarakatnya.Faktor penting untuk melihat proses pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Menurut Todaro dan Smith (2011), sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai modal dasar bagi suatu negara. Sedangkan menurut fisik dan sumberdaya alam digunakan sebagai factor produksi yang bersifat masif. Manusia berperan penting dalam mengelola sumber daya alam dengan mengumpulkan modal beserta mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan memerlukan kualitas manusia yang cukup dan berkompeten. Era 1990 silam, UNDP mengembangkan satu konsep pengukuran IPM yang dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI). Pengukuran tersebut mengakumulasikan ukuran pembangunan manusia yang terdiri atas Kesehatan, Pendidikan, serta standar hidup layak (UNDP, 1990). Pada saat ini IPM menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat dimensi pembangunan. IPM juga bermanfaat dalam menentukan level pembangunan suatu daerah atau negara. (*Badan Pusat Statistik*, 2022).

Kesehatan dan Pendidikan memiliki tujuan pembangunan yang mendasar dalam sebuah wilayah. Pendidikan menjadi modal dasar manusia yang berperan penting terhadap pembangunan manusia, hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan dapat dikatakan sebagai investasi untuk meningkatkan pembangunan manusia. Disisi lain

Kesehatan menjadi inti dari kesejahteraan dan Pendidikan merupakan hal pokok dalam pencapaian hidup layak. Konsep ini menjadi bagian dari IPM. (Septiana et al., 2015)

***Tabel 1. 1* IPM Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2021**



Sumber: BPS Indonesia, 2023

Berdasarkan table tersebut dalam regional Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi dengan tingkat IPM terendah di Pulau Jawa, dari tabel di atas menjelaskan kenaikan IPM dalam enam tahun terakhir. Kendati mengalami peningkatan, posisi tersebut hanya menempatkan Provinsi Jawa Tengah lebih baik dibanding Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi 5 dari 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Ikhtiar untuk terus meningkatkan IPM ditunjukkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yaitu “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari.” Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta masyarakat

yang berkualitas. upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan Jawa Tengah dapat bersaing dalam skala regional maupun nasional.

Dalam mewujudkan dan menaikkan laju kualitas manusia bagi pemerintah daerah Jawa Tengah masih harus menghadapi permasalahan perbedaan tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada setiap daerah nya. Perbedaan tersebut mengakibatkan masyarakat belum mampu mengolah sumber daya secara maksimal serta mendapatkan peluang pengembangan secara adil (Nisa dan Handayani, 2019)

Faktor yang mempengaruhi IPM selanjutnya adalah kemiskinan, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang sifatnya multidimensi. Salah satu indikator penting kemiskinan adalah pendapatan penduduk, selain itu juga ada tingkat Kesehatan dan Pendidikan. Pendidikan dan Kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam kemiskinan, kondisi kemiskinan akan berdampak secara tidak langsung kepada penduduk miskin untuk mendapatkan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang layak. Maka dengan itu IPM berperan penting dalam mengurangi penduduk miskin dengan cara menghitung beberapa indicator gabungan dalam perhitungan adalah seperti angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah, dan konsumsi rumah tangga. Dengan Meningkatnya sector Pendidikan, Kesehatan dan pengeluaran perkapita akan meningkatkan kualitas manusia pada suatu daerah serta akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut. (Ratu Gandasari, 2016)

Dari uraian di atas dan pemikiran yang telah dijelaskan oleh penelitian ini mengambil judul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2021"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh APS pemerintah terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021?
2. Bagaimana pengaruh PPBK terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021?

3. Bagaimana Pengeluaran Perkapita (PP) terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021?
4. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh APS terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PPBK terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pengeluaran Perkapita (PP) terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021?

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan kebijakan dalam mengidentifikasikan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan IPM khususnya di provinsi Jawa Tengah dan umumnya di Indonesia sehingga strategi-strategi yang dibuat pemerintah bisa berjalan dengan baik dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.
2. Memberi informasi yang dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi penelitian lain untuk pengetahuan peneliti dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima baby yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang berisi pengkajian dari hasil penelitian sebelumnya, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini terdapat jenis dan cara pengumpulan data, definisi variabel operasional, dan metode analisis.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan deskripsi data penelitian, hasil analisis dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini menyajikan simpulan dan implikasi yang diambil peneliti dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi disaat melakukan penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Penulis dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil dan Analisis Penelitian
1.	Novitasari & Wenagama (2021) Pengaruh Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Partisipasi Sekolah (APS) , dan Rasio ketergantungan (RK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Angka Kematian Bayi, Angka Partisipasi Sekolah, Rasio Ketergantungan dan Indeks Pembangunan Manusia	Analisis Regresi Data Panel	Variabel Angka kematian bayi (AKB), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rasio Ketergantungan (RK) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sedangkan secara bersamaan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Rasio Ketergantungan (RK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota di provinsi bali sedangkan angka partisipasi sekolah (APS) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks

				pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota di provinsi bali.
2.	Zulham et al., (2017), Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.	Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia	Analisis Regresi Data Panel	Variabel Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh sedangkan Variabel Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh dan Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.
3.	Kusumaningrum (2018) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia provinsi jawa tengah periode tahun 2006-2016.	Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, dan Indeks Pembangunan Manusia.	Analisis Regresi Data Panel	variabel PDRB tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah, variabel jumlah penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah dan

				variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan signifikan dan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi jawa tengah
4.	Asmawani & Pangidoan (2021) meneliti tentang Pengaruh (AHH), (RRLS), (PE) dan (PP) terhadap (IPM) di provinsi Sumatera utara.	Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia	Analisis Regresi Linier Berganda	(AHH) secara parsial berpengaruh terhadap Indeks pembangunan manusia, variabel (RRLS) secara parsial berpengaruh terhadap IPM, variabel (PE) secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM dan variabel (PP) berpengaruh terhadap IPM di provinsi sumatera utara.
5.	Aprilia & Cerya (2023) meneliti tentang pengaruh (APS) dan Kemiskinan terhadap (IPM) pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.	Angka Partisipasi Sekolah, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia	Analisis Regresi Data Panel	variabel angka partisipasi sekolah (APS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi sumatera barat dan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi sumatera barat.

6.	Mahya & Widowati (2021) meneliti tentang pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia	Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia	Analisis Regresi Linear Berganda.	angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita memiliki pengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia.
7.	(Tjodi et al., 2018) Meneliti tentang pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi (studi di provinsi Sulawesi utara).	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia.	Analisis Regresi Linear Berganda	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Belanja Modal signifikan dan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) signifikan dan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan Tabel 2.1 kajian penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini penulis mengacu kepada penelitian Kusumaningrum (2018) yang menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah

Bidang Kesehatan, terhadap Indeks Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2006-2016. Analisisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Pembaruan dari penelitian ini penulis menambah tahun penelitian dan menambah variabel baru, variabel independen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Perkapita, Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Periode penelitian yaitu pada tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Data Panel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan memerlukan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Pada tahun 1990 UNDP mengembangkan satu konsep pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) yang dikenal dengan istilah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan gabungan dari 3 ukuran mengenai pembangunan manusia yang terdiri dari kesehatan yang dapat diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan dapat diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta standar hidup yang layak dapat diukur melalui kemampuan daya beli (United Nations Development Programme., 1990)

Badan Pusat Statistik (2022) menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai ukuran untuk menilai pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang, kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup, untuk dimensi pendidikan menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan kemampuan daya beli digunakan sebagai alat ukur untuk dimensi kehidupan yang layak. Untuk menilai pencapaian pembangunan hidup layak menggunakan besaran rata-rata pengeluaran perkapita.

Pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah dalam periode tertentu diklasifikasikan menjadi empat kategori untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah tersebut dalam kelompok yang sama. Klasifikasi tersebut meliputi wilayah dengan indeks pembangunan manusia kurang dari 60 masuk ke dalam kategori rendah, wilayah dengan indeks pembangunan manusia antara 60 hingga 70 masuk ke dalam kategori sedang, wilayah dengan indeks pembangunan manusia antara 70 hingga 80 masuk ke dalam kategori tinggi, dan wilayah dengan indeks pembangunan manusia sangat tinggi

2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan investasi yang akan berdampak di waktu yang akan datang . pendidikan menjadi modal dasar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Menurut Badan Pusat Statistik (2023) Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai gambaran sejauh mana tingkat penyelenggaraan pendidikan formal dengan melakukan pengelompokan usia angka partisipasi sekolah. Badan pusat statistik menggunakan 4 rentang usia angka partisipasi sekolah mulai dari usia 7-12 tahun untuk sekolah dasar, usia 13-15 untuk sekolah menengah pertama, 16-18 untuk sekolah menengah atas dan 19-24 untuk perguruan tinggi.

Menurut teori human capital bahwa pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor terpenting akan menghasilkan individu yang memiliki produktivitas tinggi Schultz dalam Elfarab (2018) Semakin tinggi pendidikan individu maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas individu tersebut dalam proses pembangunan dan menyebabkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga Rumusan angka partisipasi sekolah menurut Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

$$\text{APS 7-12 Tahun} = \frac{Jumlah\ penduduk\ 7-12\ tahun\ yang\ masih\ bersekolah}{jumlah\ penduduk\ usia\ 7-12\ tahun} \times 100\ \%$$

$$\text{APS 13-15 Tahun} = \frac{Jumlah\ penduduk\ 13-15\ tahun\ yang\ masih\ bersekolah}{jumlah\ penduduk\ usia\ 13-15\ tahun} \times 100\ \%$$

$$\text{APS 16-18 Tahun} = \frac{Jumlah\ penduduk\ 16-18\ tahun\ yang\ masih\ bersekolah}{jumlah\ penduduk\ usia\ 16-18\ tahun} \times 100\ \%$$

$$\text{APS 19-24 Tahun} = \frac{Jumlah\ penduduk\ 19-24 tahun\ yang\ masih\ bersekolah}{jumlah\ penduduk\ usia\ 19-24\ tahun} \times 100\ \%$$

Angka partisipasi sekolah menjadi salah satu usaha dalam memperluas pelayanan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga akan banyak penduduk yang bersekolah. Angka partisipasi sekolah menjadi alat ukur daya serap sistem pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kemajuan pendidikan pada suatu daerah .

2.2.3 Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai program-program pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan public. Peraturan pemerintah RI No 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam memenuhi keperluan pelayanan masyarakat yang diatur dalam per undang undangan . mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Menurut Mangkoesoebroto (2016), pengeluaran pemerintah adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan suatu kebijakan tentu serta memiliki balasan atas biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut dikeluarkan dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dikeluarkan untuk suatu bidang menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap permasalahan.

1.Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia , kesehatan harus diperhatikan dikarenakan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi pemerintah dibidang kesehatan dalam peraturan perundang-undangan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur alokasi belanja di bidang kesehatan. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 % dari anggaran pengeluaran belanja negara dan untuk pemerintah daerah

setidaknya menganggarkan 10 % dari anggaran pengeluaran belanja daerah untuk di bidang kesehatan

2.2.4 Pengeluaran perkapita

Pengertian dari pengeluaran perkapita adalah rata-rata pengeluaran yang digunakan untuk mengkonsumsi semua anggota keluarga selama sebulan yang berasal dari pembelian dan pemberian dari produksi yang dibagi dengan banyaknya anggota keluarga. Konsumsi dalam rumah tangga dibedakan menjadi 2 yaitu makanan dan bukan makanan, pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu lalu sedangkan konsumsi non makanan dihitung selama 1 bulan dan 12 tahun yang lalu (Badan Pusat Statistik,2023)

Pengeluaran perkapita menjadi salah satu indikator dari standar hidup manusia yang dilandasi oleh produktivitas masyarakat dengan menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan menghasilkan pendapatan. Pendapatan digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Pengeluaran perkapita sebagai alat ukur tingkat daya beli masyarakat yang digunakan sebagai salah satu komponen melihat perkembangan pembangunan manusia.

2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang bersumber dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tertentu. Nilai tambah ini merupakan nilai yang bersumber dari penambahan dari faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Menurut Prasetyani dan Sumardi (2020), nilai tambah yang dapat dihasilkan dapat terdiri dari perkalian dua faktor yaitu, volume pertambahan yang dapat dihasilkan atau seluruh hasil dari volume barang dan jasa akhir, dan harga barang dan jasa yang dapat dinilai.

Produk domestik regional bruto atas harga konstan menggambarkan nilai tambah pada barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara langsung. Sedangkan

Produk domestik regional bruto digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergerakan serta struktur ekonomi di suatu daerah.

Produk domestik regional bruto menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran

1.Pendekatan produksi

Perhitungan Produk domestik regional bruto dengan pendekatan produksi adalah total jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai faktor produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha dikategorikan menjadi 9 sektor ekonomi. Terdiri dari

1.Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

2. Sektor pertambangan

3. Sektor industri

4. Sektor gas, listrik dan air bersih

5. Sektor konstruksi

6. Sektor hotel, restoran dan perdagangan

7. Sektor komunikasi dan pengangkutan

8. Sektor keuangan

9, Jasa-jasa

2.Pendekatan pendapatan

Perhitungan produk domestik regional bruto dengan pendekatan pendapatan adalah total upah atau gaji yang diterima oleh faktor produksi yang ikut dalam kegiatan produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu atau dalam satu tahun

3.Pendekatan pengeluaran

Perhitungan Produk domestik regional bruto dengan pendekatan pengeluaran menggunakan 6 komponen yaitu

1. **Pengeluaran rumah tangga**

Mencakup seluruh pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dilakukan rumah tanggal selama periode satu tahun

2. **Belanja pemerintah**

Mencakup pengeluaran belanja pegawai, belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan

3.Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Mencakup dalam pembelian dan pembuatan barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal dari luar negeri dengan menggunakan pendekatan arus barang

4. Perubahan Inventory.

Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.

5. Ekspor Barang dan Jasa.

Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob)

6. Impor Barang dan Jasa.

Impor barang dinilai menurut cost insurance freight (cif)

2.3 Hubungan Antara Variabel Dependent dan Independen

2.3.1 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Angka Partisipasi Sekolah

Indikator angka partisipasi sekolah (APS) menjadi salah indikator pendidikan yang menjadi ukuran tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok usia sekolah atau jenjang pendidikan. Angka partisipasi sekolah (APS) adalah persentase jumlah siswa pada kelompok umur sekolah di daerah tertentu yang sedang bersekolah diberbagai kelompok umur sekolah tertentu dan dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah dapat diartikan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Peningkatan angka partisipasi sekolah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia (salma,2018)

2.3.2 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Investasi pemerintah di bidang kesehatan dapat berupa alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana atau prasarana kesehatan di bidang kesehatan dengan tujuan masyarakat mendapatkan kemudahan akses kesehatan. Dengan kemudahan masyarakat mendapatkan akses pelayanan di sektor kesehatan, maka kebutuhan dasar-dasar masyarakat dapat terpenuhi sehingga kualitas kehidupan menjadi meningkat dengan pengoptimalan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, maka kualitas kesehatan menjadi lebih baik dapat meningkatkan produktivitas yang tinggi dan akan meningkatkan kualitas manusia (Mongan, 2019)

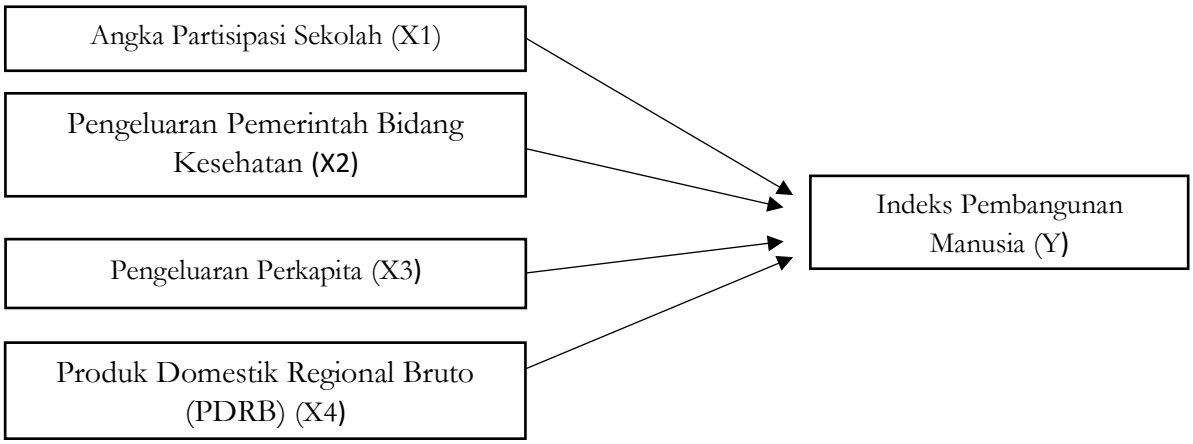
2.3.3 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita menggambarkan pengeluaran masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pengeluaran perkapita sebagai indikator dalam mengukur standar hidup manusia serta menggambarkan tingkat daya beli pada masyarakat yang dipergunakan untuk melihat peningkatan pembangunan manusia di daerah tersebut. Semakin tinggi pengeluaran perkapita menggambarkan semakin besar pendapatan masyarakat mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia, karena pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang digunakan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia (Damayanti, 2018)

2.3.4 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Produk Domestik Regional Bruto

Peningkatan Pertumbuhan Produk domestik regional bruto akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, masyarakat akan menghabiskan pendapatan nya untuk konsumsi barang dan jasa dan akan berdampak langsung pada peningkatan indeks pembangunan manusia seperti makanan, minuman, pendidikan dan kesehatan akan mempengaruhi alokasi belanja sehingga akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Rakhmadhani, 2018)

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 **Kerangka Pemikiran**

2.5 Hipotesis Penelitian

Didapatkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga Variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021.
2. Diduga Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK) berpengaruh Positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021.
3. Diduga Variabel Pengeluaran Perkapita (PP) berpengaruh Positif terhadap (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021.
4. Diduga Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Cara Dan Jenis Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis data panel dengan penggabungan data *temi serie* dengan data *cross section*. Pada penelitian ini data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan data *time series* yang terdiri dari variabel Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Sekolah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Perkapita dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2021. dan menggunakan data *cross section* berupa data dari 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependent

Indeks Pembangunan Manusia

Variabel	Definisi	Satuan	Sumber
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur kualitas pembangunan manusia melalui komponen dasar kualitas hidup.	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

	Melalui tiga pendekatan yang pertama adalah sektor pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah , sektor kesehatan dapat diukur melalui angka harapan hidup dan standar hidup yang layak, sektor ekonomi dapat diukur melalui kemampuan daya beli.		

3.2.2 Variabel Independen

Variabel	Definisi	Satuan	Sumber
Angka Partisipasi Sekolah (X1)	Angka Partisipasi Sekolah merupakan angka persentase partisipasi sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2016- 2021 dengan satuan %	Persen (%)	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2)	Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Pemerintah harus	Satuan Miliar Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

	mengalokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara Anggaran kesehatan tahun digunakan untuk percepatan peningkatan kepesertaan serta peningkatan akses dan kualitas layanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Data yang digunakan bersumber dari DJPK Kemenkeu pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2021 dengan menggunakan satuan miliar rupiah.		
Pengeluaran Perkapita (X3)	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan semua anggota rumah tangga untuk konsumsi selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data yang digunakan bersumber dari BPS pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016- 2021 dengan menggunakan satuan ribu rupiah.	Satuan Ribu Rupiah.	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Produk Domestik Regional Bruto (X4)	PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi pada suatu daerah atau juga jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data yang digunakan bersumber dari BPS Jawa Tengah pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2021 dengan menggunakan satuan juta rupiah.	Satuan Miliar Rupiah.	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

.

3.3 Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data peneliti widarjono (2018) menjelaskan analisis regresi data panel terdiri dan gabungan dua data yaitu cross section dan time series. Data *cross section* kumpulan data yang berisi objek atau sampel dan data time series berisi kumpulan data urutan waktu bisa harian, bulanan dan tahunan dan digabungkan menjadi data panel. Dalam analisis regresi data panel terdiri dari 3 model yang digunakan yaitu model *common effect*, model *fixed effect* dan *random effect*. Model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + eit$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (persen)

β_0 = Konstanta

$\beta_{1, 2, 3, 4}$ = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Angka Partisipasi Sekolah Sekolah (persen)

X_2 = Ppengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (milyar rupiah)

X_3 = Pengeluaran Perkapita(Ribu rupiah)

X_4 = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar rupiah)

i = 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

t = Tahun 2016-2021

e = Komponen error

Karena terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural adalah sebagai berikut :

a. Menghindari adanya heteroskedastisitas

b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas

c. Mendekatkan skala data.

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk semilog linear (semi-log). Dimana semi-log mempunyai beberapa keuntungan diantaranya :

a. Koefisien – koefisien model semi-log mempunyai interpertasi yang sederhana

b. Model semi-log sering mengurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas,

c. Model semi-log mudah dihitung

Sehingga persamaan penelitian dengan model semi-log adalah sebagai berikut

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \text{LOG}\ \beta_2 X_{2it} + \text{LOG}\ \beta_3 X_{3it} + \text{LOG}\ \beta_4 X_{4it} + eit$$

3.3.1 Common Effect Model

Model estimasi ini merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) dalam menduga parameter nya. Hasil regresi pada metode ini akan lebih baik daripada regresi yang

menggunakan data *cross section* atau hanya menggunakan data *time series* saja. Hal ini karena dengan menggabungkan data *time series* serta *cross section* dapat menghasilkan observasi yang banyak. Didapatkan persamaan dalam metode ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + eit$$

3.3.2 Fixed Effect Model

Model estimasi ini merupakan data panel pada variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intercept. Metode *fixed effect model* adalah model dengan asumsi koefisien kemiringan konstan dengan intercept berbeda antara individu dalam penelitian. Didapatkan persamaan pada metode ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1it} + \beta_6 D_{2it} + eit$$

3.3.3 Random Effect Model

Metode estimasi ini merupakan regresi panel dengan melibatkan asumsi koefisien slop konstan dan intercept berbeda antara individu dan antar waktu. Dalam model efek acak (*Random Effect*). Dalam model ini parameter yang berbeda lintas wilayah dan lintas waktu berkontribusi terhadap kesalahan. Didapatkan persamaan dalam metode ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + v_{it} v_{1it} = eit + u_i$$

3.4 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Pada metode analisis regresi data panel memiliki 3 model estimasi , dalam pemilihan ketiganya dibutuhkan adanya kriteria pengujian agar mampu menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasikan regresi data panel. Untuk memilih model yang tepat maka perlu pengujian yang harus dilakukan yaitu uji chow, uji Hausman dan uji LM sebagai berikut:

3.4.1 Uji Chow

Uji *Chow* merupakan uji yang ginukan untuk menentukan model yang dipilih antara *fixed effect* model dan *random effect* model dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Common Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H0. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H0. Jika Ho diterima maka hasil model terbaiknya adalah Common Effect Model sebaliknya jika H0 ditolak maka hasil uji terbaik adalah model fixed effect

3.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang terbaik antara fixed effect model atau random effect model dengan hipotesis sebagai berikut ::

H0 : Random Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H0. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H0. Jika H0 diterima merepresentasikan bahwa model yang terbaik adalah Random Effect Model dan jika hasilnya Ho ditolak maka model yang terbaik adalah Fixed Effect Model

3.4.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Langrange Multiplier digunakan untuk menentukan model terbaik antara common effect model atau random effect model dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Common Effect Model

H1 : Random Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H0. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H0. Jika Ho diterima maka model terbaiknya adalah Common effect model dan sebaliknya jika Ho ditolak maka model terbaiknya adalah Random effect model.

3.5 Uji Statistik

Berikut ini pengujian hipotesis yang akan dilakukan mempunyai berbagai uji sebagai berikut:

3.5.1 Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini berfungsi untuk mengukur persentase dari total variasi dalam variabel dependent yang diterangkan oleh variabel independen. Apabila R2 semakin tinggi maka memperjelas hubungan variabel dependent dan variabel independen. Namun apabila R2 semakin rendah maka tidak memperjelas hubungan antara variabel dependent dan variabel independen.

3.5.2 Koefisien Regresi Bersama (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka menerima hipotesis H1 maka diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent secara simultan. Ketika Menolak H0 maka F hitung lebih kecil dari F tabel yang artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent secara simultan. Hipotesis untuk uji F sebagai berikut :

H0 : $\beta1 = \beta2 = \beta3 = \beta4 = 0$ yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependent secara simultan.

H1 : $\beta1 \neq \beta2 \neq \beta3 \neq \beta4 \neq 0$, yang artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependent secara simultan

3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menunjukkan apakah ada pengaruh antara variabel dependent dan variabel independen secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Apabila nilai P-value lebih kecil dari α maka terdapat pengaruh variabel dependent terhadap variabel independen. Namun, jika nilai P-value lebih besar dari α maka tidak ada pengaruh variabel dependent terhadap variabel independen Adapun hipotesis uji T sebagai berikut :

1. Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Angka Partisipasi Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia H1 : $\beta > 0$, terdapat pengaruh positif antara Angka Partisipasi Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia . H1 : $\beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia

3.Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. H1 : $\beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia

4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia H0 : $\beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia . H1 : $\beta > 0$, terdapat pengaruh positif antara Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHSAN

4.1 DESKRIPSI DATA

Deskripsi data terdiri dari jumlah data Mean, Standar deviation, Nilai Minimum, dan Nilai Maximum. Berikut ini hasil data statistic deskriptif yang dapat diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Deskripsi Data

Variabel	N	Mean	Standar Deviation	Minimum	Maximum
IPM	210	71.89095	4.473980	63.98000	83.60000
APS	210	71.06281	9.188033	49.56000	91.39000
PPBK	210	3.79E+11	1.17E+11	1.58E+11	8.90E+11
PP	210	10801.09	1767.001	7447.000	15944.00
PDRB	210	26830785	24676866	5521525	1.45E+08

Sumber data olah data : Eviews 12

Tabel 4.1 Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hasil dari obervasi sebanyak 210 pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Didapatkan nilai *mean* yaitu 71.89095. Kemudian nilai *minimum* pada variabel Tingkat Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63.98000 dan nilai *maximum* sebesar 83.60000. Kemudian nilai *standar deviasi* sebesar 4.473980.

Pada variabel Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan hasil dari obervasi sebanyak 210 pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Didapatkan nilai *mean* yaitu 71.06281. Kemudian nilai *minimum* sebesar 49.56000 dan nilai *maximum* sebesar 91.39000. Kemudian nilai *standar deviasi* sebesar 9.188033.

Pada Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan menunjukkan hasil dari obervasi sebanyak 210 pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Didapatkan nilai *mean* yaitu 3.79E+11. Kemudian nilai *minimum* sebesar 1.58E+11 dan nilai *maximum* sebesar 8.90E+11. Kemudian nilai *standar deviasi* sebesar 1.17E+11.

Pada Pengeluaran Perkapita menunjukkan hasil dari obervasi sebanyak 210 pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Didapatkan nilai *mean* yaitu 26830785. Kemudian nilai *minimum* sebesar 7447.000 dan nilai *maximum* sebesar 15944.00. Kemudian nilai *standar deviasi* sebesar 1767.001.

Pada Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan hasil dari obervasi sebanyak 210 pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Didapatkan nilai *mean* yaitu 10801.09. Kemudian nilai *minimum* sebesar 5521525dan nilai *maximum* sebesar 1.45E+08. Kemudian nilai *standar deviasi* sebesar 24676866.

4.2 PENGUJIAN HASIL REGRESI

4.2.1 Common Effect Model

Tabel 4. 2Tabel Regresi Model Common Effect Model

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/23 Time: 17:35
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-108.7224	11.14475	-9.755487	0.0000
APS	0.165317	0.011509	14.36427	0.0000
LOG(PPBK)	-1.441684	0.414278	-3.479992	0.0006
LOG(PP)	21.10379	0.689558	30.60479	0.0000
LOG(PDRB)	0.681799	0.196965	3.461521	0.0007

Root MSE	1.337541	R-squared	0.910195
Mean dependent var	71.89095	Adjusted R-squared	0.908443
S.D. dependent var	4.473980	S.E. of regression	1.353754
Akaike info criterion	3.467162	Sum squared resid	375.6935
Schwarz criterion	3.546855	Log likelihood	-359.0520
Hannan-Quinn criter.	3.499379	F-statistic	519.4326
Durbin-Watson stat	0.245771	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : olah data eviews 12

Tabel 4. 3 Tabel Regresi Model Fixed Effect

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/23 Time: 17:36
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-123.2441	4.952347	-24.88600	0.0000
APS	0.012162	0.006114	1.989272	0.0483
LOG(PPBK)	0.793639	0.171687	4.622593	0.0000
LOG(PP)	8.324840	1.544826	5.388852	0.0000
LOG(PDRB)	5.687570	0.898060	6.333173	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.228045	R-squared	0.997389
Mean dependent var	71.89095	Adjusted R-squared	0.996809
S.D. dependent var	4.473980	S.E. of regression	0.252716
Akaike info criterion	0.252881	Sum squared resid	10.92095
Schwarz criterion	0.874487	Log likelihood	12.44747
Hannan-Quinn criter.	0.504173	F-statistic	1719.298
Durbin-Watson stat	1.260473	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : olah data eviews 12

Tabel 4. 4 Tabel Regresi Model Random Effect

Dependent Variable: IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/04/23 Time: 17:37
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-119.9285	4.480501	-26.76676	0.0000
APS	0.022518	0.005944	3.788131	0.0002
LOG(PPBK)	0.584225	0.161197	3.624285	0.0004
LOG(PP)	18.23997	0.770284	23.67953	0.0000
LOG(PDRB)	0.325736	0.330487	0.985625	0.3255

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	1.285814	0.9628
Idiosyncratic random	0.252716	0.0372

Weighted Statistics			
Root MSE	0.307824	R-squared	0.876286
Mean dependent var	5.749883	Adjusted R-squared	0.873872
S.D. dependent var	0.877263	S.E. of regression	0.311555
Sum squared resid	19.89865	F-statistic	363.0130
Durbin-Watson stat	0.961822	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics			
R-squared	0.769328	Mean dependent var	71.89095
Sum squared resid	965.0035	Durbin-Watson stat	0.019833

Sumber : olah data eviews 12

4.3 HASIL PENGUJIAN REGRESI MODEL DATA PANEL

4.3.1 Hasil Uji Chow (Chow Test)

Adapun hasil pemilihan uji regresi data panel dengan menggunakan model common effect dan fixed effect dengan menggunakan uji Chow ditampilkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	167.988229	(34,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	742.999011	34	0.0000

Sumber : olah data eviews 12

Berdasarkan hasil data uji Chow di atas, bahwa diketahui nilai probabilitas *Cross-Section Chi-square* sebesar 0,0000 < alpha (5%) maka menolak H_0 sehingga model yang lebih tepat digunakan yaitu Fixed Effect Model.

4.3.2 Uji Hausman

Adapun hasil pemilihan uji regresi data panel dengan menggunakn model fixed effect dan random effect dengan menggunakan uji Hausman ditampilkan dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	110.572534	4	0.0000

Sumber : olah data eviews 12

Uji ini digunakan untuk menentukan model apa yang lebih baik digunakan antara fixed effect atau random effect. Berdasarkan hasil data uji Hausman di atas, bahwa diketahui nilai probabilitas *Cross-Section random* sebesar 0,0000 < alpha (5%) maka menolak H_0 sehingga model yang lebih baik dipakai untuk penelitian ini yaitu Fixed Effect Model.

4.4 MODEL TERBAIK

Adapun model yang terbaik digunakan dalam regresi data panel yaitu menggunakan model fixed effect yang ditampilkan dalam tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Regresi Data Panel Model Terbaik : Fixed Effect Model

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/04/23 Time: 17:43
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-123.2441	4.952347	-24.88600	0.0000
APS	0.012162	0.006114	1.989272	0.0483
LOG(PPBK)	0.793639	0.171687	4.622593	0.0000
LOG(PP)	8.324840	1.544826	5.388852	0.0000
LOG(PDRB)	5.687570	0.898060	6.333173	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.228045	R-squared	0.997389
Mean dependent var	71.89095	Adjusted R-squared	0.996809
S.D. dependent var	4.473980	S.E. of regression	0.252716
Akaike info criterion	0.252881	Sum squared resid	10.92095
Schwarz criterion	0.874487	Log likelihood	12.44747
Hannan-Quinn criter.	0.504173	F-statistic	1719.298
Durbin-Watson stat	1.260473	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : olah data eviews 12

4.4.1 Uji Kebaikan Regresi (R^2)

Berdasarkan data di atas didapatkan nilai koefisien R^2 sebesar 0.997389 yang artinya APS, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan , Pengeluaran Perkapita, dan PDRB mampu menjelaskan bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen sebesar 99,73% sedangkan sisanya 0,27% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka menolak H_0. Maka Angka Partisipasi Sekolah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Perkapita, dan PDRB secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4.4.3 Uji statistik (Uji t)

1. Variabel Angka Partisipasi Sekolah (X1) mempunyai nilai koefisien sebesar 0.012162 dengan t-hitung sebesar 1.989272. Nilai probabilitasnya sebesar 0.0483 < α 5% maka variabel APS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Maka dengan ini apabila APS naik 1% maka IPM naik sebanyak 0,00012%.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0.793639 dengan t-hitung sebesar 4.622593. Nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 < α 5% maka variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Maka dengan ini apabila pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik 1% maka indeks pembangunan manusia naik sebanyak 0.79%.
3. Variabel Pengeluaran Perkapita (X3) mempunyai nilai koefisien sebesar 8.324840 dengan t-hitung sebesar 5.388852. Nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 < α 5% maka variabel pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan

manusia. Maka dengan ini apabila pengeluaran perkapita naik 1% maka indeks pembangunan manusia naik sebanyak 8.32%.

4. Variabel PDRB (X4) mempunyai nilai koefisien sebesar 5.687570. dengan t-hitung sebesar 6.333173. Nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 < α 5% maka variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Maka dengan ini apabila pdrb naik 1% maka indeks pembangunan manusia naik sebanyak 5,68%.

4.5 INTERPRETASI HASIL

4.5.1 Hubungan APS Terhadap IPM.

Variabel APS (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.012162 dengan t-hitung sebesar 1.989272. Nilai probabilitasnya sebesar 0.0483 > α 5% maka variabel APS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Maka dengan ini apabila Angka Partisipasi Sekolah naik 1% maka indeks pembangunan manusia naik sebanyak 0,00012%.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Aprilia & Cerya, 2023) menjelaskan bahwa variabel APS signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM artinya, apabila terjadi peningkatan pada tingkat angka partisipasi sekolah maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan. Dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah, 2020)menjelaskan bahwa variabel Angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4.5.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0.793639 dengan t-hitung sebesar 4.622593. Nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 < α 5% maka variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Maka dengan ini apabila pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik 1% maka indeks pembangunan manusia naik sebanyak 0.79%.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Soleha & Fathurrahman, 2017) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan kualitas di bidang kesehatan menjadi penunjang berjalan nya kegiatan ekonomi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan mampu Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Siregar et al., 2017) Menjelaskan bahwa ada pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia modal manusia merupakan hasil dari investasi yang diberikan pemerintah untuk bidang kesehatan di mana bidang kesehatan yang baik dapat meningkatkan pembangunan manusia.

4.5.3 Hubungan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Variabel Pengeluaran Perkapita (X3) mempunyai nilai koefisien sebesar 8.324840 dengan t-hitung sebesar 5,388852. Nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 < α 5% maka variabel pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Maka dengan ini apabila pengeluaran perkapita naik 1% maka indeks pembangunan manusia naik sebanyak 8.32%.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Permana et al., 2019) menjelaskan bahwa variabel pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang artinya semakin tinggi nominal pengeluaran perkapita semakin tinggi nilai persentase Indeks Pembangunan Manusia. Dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2023) Menjelaskan bahwa variabel pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

4.5.4 Hubungan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Variabel PDRB (X4) memiliki nilai koefisien sebesar 5.687570. dengan t-hitung sebesar 6.333173. Nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 < α 5% maka variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan

manusia. Maka dengan ini apabila pdrb naik 1% maka indeks pembangunan manusia naik sebanyak 5.68%.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Diba et al., 2018) Pertumbuhan ekonomi atau yang disebut PDRB, tingginya pertunbuhan output menjadikan perubahan konsumsi dalam hal tingkat daya beli masyarakat, artinya semakin meningkatnya petumbuhan ekonomi naka akan meningkatkan output perkapita dan mengubah pola konsumsi dalam hal ini akan menigkatkan daya beli masyarakat. Hal ini didukung pula penelitian yang dilakukan oleh (Naibaho et al., 2021) menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

1. APS berpengaruh positif serta signifikan terhadap IPM pada kabupaten / kota di provinsi jawa tengah tahun 2016 hingga 2021. Semakin besarnya angka partisipasi sekolah maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif serta signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten / kota di provinsi jawa tengah tahun 2016 hingga 2021. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

3. Pengeluaran Perkapita berpengaruh positif serta signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten / kota di provinsi jawa tengah tahun 2016 hingga 2021. Semakin besarnya pengeluaran perkapita maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

4. PDRB berpengaruh positif serta signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten / kota di provinsi jawa tengah tahun 2016 hingga 2021. Semakin besarnya PDRB maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

5.2 Implikasi

APS

1. Adanya pengaruh signifikan dan positif dalam Angka Partisipasi Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, maka pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai pentingnya sekolah supaya mampu meningkatkan kesadaran para orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan. Sehingga akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul di Provinsi Jawa Tengah dan akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, oleh karena itu, diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor Kesehatan guna meningkatkan Kesehatan masyarakat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
3. Adanya pengaruh signifikan dan positif dalam Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan meningkatkan sektor-sektor yang berpotensi seperti sektor UMKM, industri, pertanian, dan sektor pariwisata. Adanya pertumbuhan dalam sektor tersebut maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menaikkan pengeluaran perkapita.
4. Adanya pengaruh signifikan dan positif dalam Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah hendaknya melakukan upaya peningkatan PDRB di masing-masing wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki. Dengan begitu daya beli masyarakat akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, O., & Cerya, E. (2023). *Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Kabupaten Di Provinsi Sumatera Barat*. *02*(1).

Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, *2*(3), 433. https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414

Ashshiddiqi, M. T., Firmansyah, I., Ahyani, K. S., Putri, L. F. E., & Maulana, M. F. (2021).Strategi Program Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Desa Pakuaon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(4), 2013–2015.

Asmawani, & Pangidoan, D. (2021). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Samosir serta Serdang Berdagai. *Jurnal Sains Ekonomi*, *2*(1), 96–109

Badan Pusat Statistik (2022) Diambil pada 3 April 2022.

Damayanti, S. (2018). *analisis pengaruh pengeluaran penduduk, pengeluaran pemerintah, dan rasio ketergantungan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di indonesia*.

Hanifah, mahardika. (2020). *analisis pengaruh angka partisipasi sekolah, pertumbuhan ekonomi, rasio gini, dan penghimpunan dana zis terhadap indeks pembangunan manusia di indonesia tahun 2012-2016*. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf

https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html

Jauhar Mahya, A. (2021). Pengaruh angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia. In *Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika* (Vol. 3, Issue 2). http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/prismatika
Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(2), 163–176.

Kusumaningrum, R. A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia provinsi jawa tengah periode tahun 2006-2016.
Mangkoesoebroto, D. (2016). *Ekonomi publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogya

Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatanterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indonesian Treasury Review

Nisa, A., & Handayani, H. R. (2021). Masyarakat Di Jawa Tengah. Diponegoro Journal of Economics, 10(1), 1–13.

Novitasar, N. M. A. W., & Wenagama, I. W. (2021). pengaruh angka kematian bayi, angka partisipasi sekolah, dan rasio ketergantungan terhadap indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal EP Unud,11[08] : 3271-3299 ISSN: 2303-0178*.

Permana, A., Rustamunad, & Sunardi, D. (2019). *pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi banten periode 2012-2016*.

presetyani, dwi, & sumardi. (2020). ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).

Rakhmadhani, M. R. (2018). analisis pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb), kesenjangan antar daerah dan pembiayaan sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) kabupaten/kota di provinsi jawa timur. In *Jurnal Ilmu Ekonomi* (Vol. 2).

Sanggelorang, S. M. M., Rumate, V. A., & Siwu, F. D. J. (2015). Sulawesi Utara. Http://Www.Sulutprov.Go.Id/Mengenal-Sulut/Sejarah/, 15(02), 1–11

Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *6*(2), 236–255. https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345

Siregar, R., Nasution, H. F., & Tanjung, S. F. (2017). *pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di provinsi sumatera utara*.

Soleha, K. G., & Fathurrahman, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). In *Journal of Economics Research and Social Sciences* (Vol. 1, Issue 1).

Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2018). *pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi (studi di provinsi sulawesi utara*

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan ekonomi (Edisi Kesebelas ed.).Erlangga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

United Nations Development Programme. (1990). *Human development report 1990*. Oxford University Press for the U.N.D.P.

Widarjono, A. (2016). Ekonomika Pengantar dan Aplikasi Edisi 4. In Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widarjono, A. (2018). Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviews.upp stim ykpn

Wulandari, I. A. (2023). *pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (ipm) di provinsi kalimantan barat tahun 2010-2019*.

Zulham, T., Seftarita, C., Ilmu Ekonomi, J., Unsyiah, F., & Aceh, B. (2017). *analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan pdrb terhadap ipm di provinsi aceh*. *3*(1). www.bps.go.id

LAMPIRAN

Tahun	Kabupaten/Kota	IPM	PP	PPBK	PDRB	APS
2016	Kabupaten Cilacap	68,6	9677	404.906.797.000	92.858.649	74,71
2017	Kabupaten Cilacap	68,9	9896	425.607.874.000	95.254.586	69,84
2018	Kabupaten Cilacap	69,56	10274	495.135.020.934	98.100.568	68,12
2019	Kabupaten Cilacap	69,98	10639	556.088.038.000	100.328.438	68,23
2020	Kabupaten Cilacap	69,95	10440	638.464.562.136	89.934.720	68,67
2021	Kabupaten Cilacap	70,42	10534	581.409.063.326	91.944.588	70,22
2016	Kabupaten Banyumas	70,49	10554	523.550.263.565	33.051.046	71,33
2017	Kabupaten Banyumas	70,75	10713	576.937.912.592	35.147.313	67,07
2018	Kabupaten Banyumas	71,3	11240	595.237.950.989	37.414.500	61,49
2019	Kabupaten Banyumas	71,96	11703	656.418.418.858	39.779.320	62,51
2020	Kabupaten Banyumas	71,98	11448	729.406.722.222	39.121.623	62,38
2021	Kabupaten Banyumas	72,44	11546	675.219.365.516	40.686.808	69,23
2016	Kabupaten Purbalingga	67,48	9159	269.311.793.000	14.816.429	67,51
2017	Kabupaten Purbalingga	67,72	9340	363.545.707.000	15.612.285	60,97
2018	Kabupaten Purbalingga	68,41	9786	323.710.546.201	16.458.708	59,45
2019	Kabupaten Purbalingga	68,99	10131	359.475.210.000	17.387.941	59,96
2020	Kabupaten Purbalingga	68,97	9914	363.183.394.000	17.174.549	60,21
2021	Kabupaten Purbalingga	69,15	10032	355.122.879.826	17.731.438	60,31
2016	Kabupaten Banjarnegara	65,52	8400	185.897.978.800	12.932.884	54,4
2017	Kabupaten Banjarnegara	65,86	8630	287.682.531.000	13.663.266	62,8
2018	Kabupaten Banjarnegara	66,54	9160	300.952.989.436	14.438.149	64,12
2019	Kabupaten Banjarnegara	67,34	9547	328.200.466.500	15.246.865	64,39
2020	Kabupaten Banjarnegara	67,45	9263	359.837.465.460	15.045.884	64,75
2021	Kabupaten Banjarnegara	67,86	9407	351.603.014.734	15.536.477	64,45
2016	Kabupaten Kebumen	67,41	8276	328.687.125.000	16.923.719	80,32

2017	Kabupaten Kebumen	68,29	8446	397.441.856.000	17.794.789	85,01
2018	Kabupaten Kebumen	68,8	8757	408.338.923.452	18.778.048	79,17
2019	Kabupaten Kebumen	69,6	9066	483.896.144.000	19.815.062	79,63
2020	Kabupaten Kebumen	69,81	8901	499.418.500.000	19.526.363	79,84
2021	Kabupaten Kebumen	70,05	9028	477.748.351.843	20.253.059	79,91
2016	Kabupaten Purworejo	70,66	9497	284.461.841.824	11.421.552	77,79
2017	Kabupaten Purworejo	71,31	9601	317.309.758.788	12.023.780	85,24
2018	Kabupaten Purworejo	71,87	10048	317.706.908.434	12.664.976	83,76
2019	Kabupaten Purworejo	72,5	10342	351.635.740.991	13.353.574	83,84
2020	Kabupaten Purworejo	72,68	10163	476.491.729.716	13.132.491	84,12
2021	Kabupaten Purworejo	72,98	10275	413.777.452.478	13.573.469	84,15
2016	Kabupaten Wonosobo	66,19	9877	224.569.761.130	11.941.198	51,22
2017	Kabupaten Wonosobo	66,89	9969	227.403.239.930	12.436.048	55,14
2018	Kabupaten Wonosobo	67,81	10503	292.453.843.661	13.065.841	57,04
2019	Kabupaten Wonosobo	68,27	10871	293.345.339.404	13.798.836	59,22
2020	Kabupaten Wonosobo	68,22	10621	322.916.423.521	13.569.633	58,82
2021	Kabupaten Wonosobo	68,43	10760	318.064.574.558	14.064.764	59,45
2016	Kabupaten Magelang	67,85	8501	325.639.015.165	19.882.244	67,24
2017	Kabupaten Magelang	68,39	8627	331.301.289.737	20.974.801	70,36
2018	Kabupaten Magelang	69,11	9025	391.419.763.464	22.082.795	68,05
2019	Kabupaten Magelang	69,87	9387	466.061.701.328	23.253.154	68,36
2020	Kabupaten Magelang	69,87	9301	482.569.517.449	22.861.470	68,5
2021	Kabupaten Magelang	70,12	9440	385.026.724.015	23.661.713	67,66
2016	Kabupaten Boyolali	72,18	12192	319.990.653.000	19.139.359	57,73
2017	Kabupaten Boyolali	72,64	12262	327.110.605.000	20.248.849	66,69
2018	Kabupaten Boyolali	73,22	12758	368.476.977.761	21.406.268	69,73
2019	Kabupaten Boyolali	73,8	13079	380.911.296.000	22.681.097	73,26

2020	Kabupaten Boyolali	74,25	12910	442.063.424.920	22.399.517	74,74
2021	Kabupaten Boyolali	74,4	13031	492.626.375.621	23.447.366	74,55
2016	Kabupaten Klaten	73,97	11227	216.755.260.000	23.725.740	75,8
2017	Kabupaten Klaten	74,25	11369	248.272.987.000	24.993.103	81,23
2018	Kabupaten Klaten	74,79	11738	253.353.147.943	26.360.649	77,09
2019	Kabupaten Klaten	75,29	12074	317.213.262.791	27.811.509	79,92
2020	Kabupaten Klaten	75,56	11921	345.360.385.627	27.482.912	80,12
2021	Kabupaten Klaten	76,12	12017	329.709.588.780	28.531.108	80,23
2016	Kabupaten Sukoharjo	75,06	10452	284.294.928.000	22.847.982	81,03
2017	Kabupaten Sukoharjo	75,56	10765	297.706.623.000	24.163.939	82,48
2018	Kabupaten Sukoharjo	76,07	11100	296.981.144.339	25.564.065	82,73
2019	Kabupaten Sukoharjo	76,84	11557	336.027.250.000	27.076.442	81,92
2020	Kabupaten Sukoharjo	76,98	11325	378.417.918.000	26.616.937	82,4
2021	Kabupaten Sukoharjo	77,13	11428	347.219.597.067	27.634.117	82,02
2016	Kabupaten Wonogiri	68,23	8589	240.988.113.200	17.869.145	73,11
2017	Kabupaten Wonogiri	68,66	8765	281.847.655.770	18.818.939	81,61
2018	Kabupaten Wonogiri	69,37	9117	351.518.681.213	19.837.022	81,82
2019	Kabupaten Wonogiri	69,98	9426	361.461.201.344	20.856.209	81,02
2020	Kabupaten Wonogiri	70,25	9286	379.612.304.336	20.561.601	81,22
2021	Kabupaten Wonogiri	70,49	9429	444.047.497.961	21.251.165	80
2016	Kabupaten Karanganyar	74,9	10722	310.239.029.000	22.436.293	81,47
2017	Kabupaten Karanganyar	75,22	10933	269.465.021.500	23.731.952	79,32
2018	Kabupaten Karanganyar	75,54	11223	285.661.985.260	25.150.277	83,83
2019	Kabupaten Karanganyar	75,89	11569	316.142.913.500	26.641.186	83,23
2020	Kabupaten Karanganyar	75,86	11428	341.088.694.162	26.142.872	83,1
2021	Kabupaten Karanganyar	75,99	11509	331.267.005.235	27.034.107	82,95
2016	Kabupaten Sragen	71,43	11688	347.262.034.000	22.625.821	77,72

2017	Kabupaten Sragen	72,4	12041	398.373.992.000	23.977.207	78,71
2018	Kabupaten Sragen	72,96	12391	406.091.427.699	25.356.459	79,73
2019	Kabupaten Sragen	73,43	12720	520.382.687.244	26.853.059	82,03
2020	Kabupaten Sragen	73,95	12589	534.233.414.991	26.367.261	82,09
2021	Kabupaten Sragen	74,08	12679	481.618.615.566	27.355.145	81,44
2016	Kabupaten Grobogan	68,52	9487	357.334.455.360	16.682.629	59,21
2017	Kabupaten Grobogan	68,87	9716	372.539.682.502	17.659.254	56,5
2018	Kabupaten Grobogan	69,32	10097	424.610.649.344	18.688.571	59,76
2019	Kabupaten Grobogan	69,86	10350	456.582.057.837	19.692.631	59,48
2020	Kabupaten Grobogan	69,87	10221	431.454.614.412	19.379.683	59,44
2021	Kabupaten Grobogan	70,41	10294	411.099.534.304	20.115.533	60,51
2016	Kabupaten Blora	66,61	8846	291.599.443.000	15.914.663	60,11
2017	Kabupaten Blora	67,52	9065	329.713.044.000	16.866.640	67,49
2018	Kabupaten Blora	67,95	9385	343.906.213.409	17.605.216	73,22
2019	Kabupaten Blora	68,65	9795	365.032.150.919	18.318.415	73,3
2020	Kabupaten Blora	68,84	9571	377.103.288.735	17.464.948	73,13
2021	Kabupaten Blora	69,37	9669	421.135.442.775	18.126.446	73,75
2016	Kabupaten Rembang	68,6	9453	282.515.894.526	11.423.008	60,97
2017	Kabupaten Rembang	68,95	9736	287.405.764.069	12.220.172	68,92
2018	Kabupaten Rembang	69,46	10191	268.888.757.384	12.939.682	68,54
2019	Kabupaten Rembang	70,15	10551	273.278.898.541	13.612.335	68,18
2020	Kabupaten Rembang	70,02	10328	342.826.615.245	13.409.631	68,97
2021	Kabupaten Rembang	70,43	10519	352.562.848.826	13.925.516	68,58
2016	Kabupaten Pati	69,03	9548	399.269.505.000	26.130.205	68,63
2017	Kabupaten Pati	70,12	9813	445.903.785.600	27.612.445	63,29
2018	Kabupaten Pati	70,71	10190	434.271.687.861	29.189.879	69,85
2019	Kabupaten Pati	71,35	10660	459.076.744.450	30.900.203	72,53
2020	Kabupaten Pati	71,77	10390	499.714.987.250	30.545.614	72,51
2021	Kabupaten Pati	72,28	10506	443.876.542.696	31.559.078	72,9

2016	Kabupaten Kudus	72,94	10348	344.703.193.000	66.679.583	75,74
2017	Kabupaten Kudus	73,84	10639	290.361.292.000	68.821.162	70,47
2018	Kabupaten Kudus	74,58	10979	392.019.629.855	71.048.973	73,91
2019	Kabupaten Kudus	74,94	11318	383.484.004.000	73.249.694	73,2
2020	Kabupaten Kudus	75	11160	430.556.910.000	70.662.043	73,05
2021	Kabupaten Kudus	75,16	11272	399.835.127.212	69.872.224	73,17
2016	Kabupaten Jepara	70,25	9695	264.031.544.000	18.080.634	62,74
2017	Kabupaten Jepara	70,79	9745	359.250.753.045	19.055.335	66,33
2018	Kabupaten Jepara	71,38	10169	386.491.195.813	20.170.255	68,26
2019	Kabupaten Jepara	71,88	10609	404.556.352.000	21.384.282	68,47
2020	Kabupaten Jepara	71,99	10343	424.967.987.000	20.969.877	68,97
2021	Kabupaten Jepara	72,36	10536	451.158.456.824	21.944.232	69,07
2016	Kabupaten Demak	70,1	9377	254.576.094.160	15.672.482	61,76
2017	Kabupaten Demak	70,41	9544	305.865.525.000	16.584.124	70,89
2018	Kabupaten Demak	71,26	10001	306.219.697.700	17.479.877	76,27
2019	Kabupaten Demak	71,87	10344	499.979.911.780	18.417.009	76,31
2020	Kabupaten Demak	72,22	10128	429.316.479.564	18.374.561	77,41
2021	Kabupaten Demak	72,57	10248	410.925.171.462	18.856.415	75,91
2016	Kabupaten Semarang	72,4	11102	335.197.007.659	30.292.468	71,09
2017	Kabupaten Semarang	73,2	11389	416.386.289.000	32.002.984	73,34
2018	Kabupaten Semarang	73,61	11807	427.082.215.708	33.817.679	74,39
2019	Kabupaten Semarang	74,14	12116	432.402.169.000	35.639.310	74,69
2020	Kabupaten Semarang	74,1	11966	468.026.303.909	34.687.623	74,91
2021	Kabupaten Semarang	74,24	12070	443.750.050.143	35.948.862	74,62
2016	Kabupaten Temanggung	67,6	8593	293.803.136.893	13.116.363	65,89
2017	Kabupaten Temanggung	68,34	8794	350.365.001.201	13.776.254	61,18
2018	Kabupaten Temanggung	68,83	9142	289.855.435.880	14.483.255	70,09
2019	Kabupaten Temanggung	69,56	9489	368.649.236.746	15.214.058	73,54

2020	Kabupaten Temanggung	69,57	9343	361.079.847.288	14.890.753	74,15
2021	Kabupaten Temanggung	69,88	9408	345.582.484.224	15.387.930	73,37
2016	Kabupaten Kendal	70,11	10631	296.993.465.010	26.139.414	67,77
2017	Kabupaten Kendal	70,62	10863	359.482.649.164	27.649.777	62,81
2018	Kabupaten Kendal	71,28	11257	376.324.873.682	29.245.664	70,68
2019	Kabupaten Kendal	71,97	11597	428.669.949.382	30.916.386	69,74
2020	Kabupaten Kendal	72,29	11425	466.821.795.248	30.443.688	70,55
2021	Kabupaten Kendal	72,5	11608	376.020.622.189	31.632.276	72,19
2016	Kabupaten Batang	66,38	8568	244.633.788.503	12.948.191	64,48
2017	Kabupaten Batang	67,35	8805	290.522.383.685	13.667.079	60,9
2018	Kabupaten Batang	67,86	9203	298.611.254.206	14.448.625	64,62
2019	Kabupaten Batang	68,42	9573	313.137.464.514	15.226.885	64,2
2020	Kabupaten Batang	68,65	9431	333.726.062.955	15.030.577	64,58
2021	Kabupaten Batang	68,92	9524	333.726.062.955	15.764.265	64,95
2016	Kabupaten Pekalongan	67,71	9300	378.703.491.435	13.921.651	55,41
2017	Kabupaten Pekalongan	68,4	9702	422.133.702.000	14.679.128	60,76
2018	Kabupaten Pekalongan	68,97	10221	402.534.680.063	15.525.050	66,65
2019	Kabupaten Pekalongan	69,71	10508	534.412.166.700	16.356.350	66,34
2020	Kabupaten Pekalongan	69,63	10312	574.745.625.211	16.047.511	66,69
2021	Kabupaten Pekalongan	70,11	10409	433.325.839.422	16.615.065	66,11
2016	Kabupaten Pemalang	64,17	7447	225.921.933.750	15.469.800	56,01
2017	Kabupaten Pemalang	65,04	7785	261.496.268.000	16.336.984	62,28
2018	Kabupaten Pemalang	65,67	8186	320.960.471.627	17.265.888	59,83
2019	Kabupaten Pemalang	66,32	8546	375.348.580.000	18.267.199	59,14
2020	Kabupaten Pemalang	66,32	8461	435.351.049.550	18.146.605	59,1
2021	Kabupaten Pemalang	66,56	8573	399.292.264.415	18.933.194	59,41
2016	Kabupaten Tegal	65,84	8709	373.626.056.000	21.182.917	62,39
2017	Kabupaten Tegal	66,44	9136	316.584.078.000	22.322.100	60,68
2018	Kabupaten Tegal	67,33	9433	394.108.438.658	23.552.548	65,34
2019	Kabupaten Tegal	68,24	9798	495.910.567.500	24.866.727	65,49

2020	Kabupaten Tegal	68,39	9612	508.969.980.874	24.502.618	66,17
2021	Kabupaten Tegal	68,79	9700	492.812.509.333	25.401.911	67,13
2016	Kabupaten Brebes	63,98	9148	501.781.922.000	27.930.986	56,68
2017	Kabupaten Brebes	64,86	9554	497.463.200.000	29.509.206	53,72
2018	Kabupaten Brebes	65,68	9890	464.655.465.469	31.060.106	49,56
2019	Kabupaten Brebes	66,12	10238	582.389.257.000	32.835.670	50,17
2020	Kabupaten Brebes	66,11	10058	549.456.361.330	32.640.966	51,61
2021	Kabupaten Brebes	66,32	10152	506.407.807.573	33.533.328	56,13
2016	Kota Magelang	77,16	11090	223.690.596.000	5.521.525	83,3
2017	Kota Magelang	77,84	11525	268.522.644.000	5.820.532	90,74
2018	Kota Magelang	78,31	11994	305.770.396.190	6.138.622	89,58
2019	Kota Magelang	78,8	12514	360.570.009.000	6.472.539	91,39
2020	Kota Magelang	78,99	12210	311.863.475.303	6.314.047	90,79
2021	Kota Magelang	79,43	12349	385.026.724.015	6.513.894	90,88
2016	Kota Surakarta	80,76	13900	158.048.503.000	29.975.873	86,48
2017	Kota Surakarta	80,85	13986	228.795.264.000	31.685.480	81,28
2018	Kota Surakarta	81,46	14528	337.176.210.839	33.505.900	76,92
2019	Kota Surakarta	81,86	15049	382.983.065.106	35.442.856	75,8
2020	Kota Surakarta	82,21	14761	313.831.745.314	34.827.188	76,25
2021	Kota Surakarta	82,62	14911	329.170.853.047	36.211.248	75,67
2016	Kota Salatiga	81,14	14811	197.494.854.000	8.168.241	85,27
2017	Kota Salatiga	81,68	14921	234.708.156.814	8.624.240	86,86
2018	Kota Salatiga	82,41	15464	242.617.061.000	9.127.857	84,34
2019	Kota Salatiga	83,12	15944	251.412.070.000	9.666.004	85,68
2020	Kota Salatiga	83,14	15699	276.364.218.950	9.503.162	84,78
2021	Kota Salatiga	83,6	15843	250.723.164.328	9.821.995	85,18
2016	Kota Semarang	81,19	13909	528.567.996.299	115.542.560	83,56
2017	Kota Semarang	82,01	14334	646.681.693.038	123.279.891	76,12

2018	Kota Semarang	82,72	14895	688.485.758.000	131.266.362	70,72
2019	Kota Semarang	83,19	15550	743.651.191.154	140.209.392	72,87
2020	Kota Semarang	83,05	15243	844.274.090.397	137.951.302	74,66
2021	Kota Semarang	83,55	15425	889.730.452.991	144.704.571	74,63
2016	Kota Pekalongan	73,32	11721	166.599.229.000	6.367.272	66,08
2017	Kota Pekalongan	73,77	11800	190.108.196.000	6.706.278	66,08
2018	Kota Pekalongan	74,24	12312	160.158.754.026	7.087.915	61,32
2019	Kota Pekalongan	74,77	12680	207.306.828.000	7.477.425	64,98
2020	Kota Pekalongan	74,98	12467	235.820.825.720	7.337.833	65,24
2021	Kota Pekalongan	75,4	12598	231.649.803.548	7.601.486	64,5
2016	Kota Tegal	73,55	11849	373.626.056.000	9.445.030	65,57
2017	Kota Tegal	73,95	12283	316.973.726.000	10.006.943	70,06
2018	Kota Tegal	74,44	12830	238.907.950.788	10.594.340	78,4
2019	Kota Tegal	74,93	13250	308.287.332.000	11.205.322	78,43
2020	Kota Tegal	75,07	12999	363.137.018.000	10.953.333	78,12
2021	Kota Tegal	75,52	13143	302.812.049.789	11.290.268	78,4

COMMON EFFECT

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/12/23 Time: 16:41
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-108.7224	11.14475	-9.755487	0.0000
APS	0.165317	0.011509	14.36427	0.0000
LOG(PPBK)	-1.441684	0.414278	-3.479992	0.0006
LOG(PP)	21.10379	0.689558	30.60479	0.0000
LOG(PDRB)	0.681799	0.196965	3.461521	0.0007

Root MSE	1.337541	R-squared	0.910195
Mean dependent var	71.89095	Adjusted R-squared	0.908443
S.D. dependent var	4.473980	S.E. of regression	1.353754
Akaike info criterion	3.467162	Sum squared resid	375.6935
Schwarz criterion	3.546855	Log likelihood	-359.0520
Hannan-Quinn criter.	3.499379	F-statistic	519.4326
Durbin-Watson stat	0.245771	Prob(F-statistic)	0.000000

FIXED EFFECT

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/12/23 Time: 16:42
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-123.2441	4.952347	-24.88600	0.0000
APS	0.012162	0.006114	1.989272	0.0483
LOG(PPBK)	0.793639	0.171687	4.622593	0.0000
LOG(PP)	8.324840	1.544826	5.388852	0.0000
LOG(PDRB)	5.687570	0.898060	6.333173	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.228045	R-squared	0.997389
Mean dependent var	71.89095	Adjusted R-squared	0.996809
S.D. dependent var	4.473980	S.E. of regression	0.252716
Akaike info criterion	0.252881	Sum squared resid	10.92095
Schwarz criterion	0.874487	Log likelihood	12.44747
Hannan-Quinn criter.	0.504173	F-statistic	1719.298
Durbin-Watson stat	1.260473	Prob(F-statistic)	0.000000

RANDOM EFFECT

Dependent Variable: IPM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/12/23 Time: 16:42
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-119.9285	4.480501	-26.76676	0.0000
APS	0.022518	0.005944	3.788131	0.0002
LOG(PPBK)	0.584225	0.161197	3.624285	0.0004
LOG(PP)	18.23997	0.770284	23.67953	0.0000
LOG(PDRB)	0.325736	0.330487	0.985625	0.3255

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	1.285814	0.9628
Idiosyncratic random	0.252716	0.0372

Weighted Statistics

Root MSE	0.307824	R-squared	0.876286
Mean dependent var	5.749883	Adjusted R-squared	0.873872
S.D. dependent var	0.877263	S.E. of regression	0.311555
Sum squared resid	19.89865	F-statistic	363.0130
Durbin-Watson stat	0.961822	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.769328	Mean dependent var	71.89095
Sum squared resid	965.0035	Durbin-Watson stat	0.019833

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	167.988229	(34,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	742.999011	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/12/23 Time: 16:42
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-108.7224	11.14475	-9.755487	0.0000
APS	0.165317	0.011509	14.36427	0.0000
LOG(PPBK)	-1.441684	0.414278	-3.479992	0.0006
LOG(PP)	21.10379	0.689558	30.60479	0.0000
LOG(PDRB)	0.681799	0.196965	3.461521	0.0007

Root MSE	1.337541	R-squared	0.910195
Mean dependent var	71.89095	Adjusted R-squared	0.908443
S.D. dependent var	4.473980	S.E. of regression	1.353754
Akaike info criterion	3.467162	Sum squared resid	375.6935
Schwarz criterion	3.546855	Log likelihood	-359.0520
Hannan-Quinn criter.	3.499379	F-statistic	519.4326
Durbin-Watson stat	0.245771	Prob(F-statistic)	0.000000

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	110.572534	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
APS	0.012162	0.022518	0.000002	0.0000
LOG(PPBK)	0.793639	0.584225	0.003492	0.0004
LOG(PP)	8.324840	18.239972	1.793150	0.0000
LOG(PDRB)	5.687570	0.325736	0.697290	0.0000

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 06/12/23 Time: 16:43
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-123.2441	4.952347	-24.88600	0.0000
APS	0.012162	0.006114	1.989272	0.0483
LOG(PPBK)	0.793639	0.171687	4.622593	0.0000
LOG(PP)	8.324840	1.544826	5.388852	0.0000
LOG(PDRB)	5.687570	0.898060	6.333173	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.228045	R-squared	0.997389
Mean dependent var	71.89095	Adjusted R-squared	0.996809
S.D. dependent var	4.473980	S.E. of regression	0.252716
Akaike info criterion	0.252881	Sum squared resid	10.92095
Schwarz criterion	0.874487	Log likelihood	12.44747
Hannan-Quinn criter.	0.504173	F-statistic	1719.298
Durbin-Watson stat	1.260473	Prob(F-statistic)	0.000000